

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENGENDALIAN  
AKUNTANSI, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN KOMITMEN  
ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Studi Pada Organisasi Perangkat  
Daerah Kota Pekanbaru)**

**Weni Asisca<sup>1)</sup>, M. Rasuli<sup>2)</sup>, Mudrika Alamsyah Hasan<sup>2)</sup>**

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

Email: [weniasisca98@gmail.com](mailto:weniasisca98@gmail.com)

*The Effect Of The Utilization Of Information Technology, Accounting Control, And  
Reporting Systems On Accountability Performance Of Government Institutions  
With Organizational Commitments As Moderating Variables  
(Studies In Regional Organizations Of Pekanbaru City)*

**ABSTRACT**

*This Study was aimed to examine the effect of the use of information technology, accounting controls, and reporting systems on the performance accountability of government agencies with organizational commitment as a moderating variable. This study used primary data by distributing questionnaires. The method of analysis used in this study is multiple linear regression analysis and moderation regression analysis. The results of this study indicate that: (1) the use of information technology has no effect on the performance accountability of government agencies, (2) accounting controls affect the accountability of the performance of government agencies, (3) the reporting system has no effect on the accountability of the performance of government agencies, (4) organizational commitment can moderate the relationship between the use of information technology on the performance accountability of government agencies, (5) organizational commitment can moderate the relationship between accounting control and accountability for the performance of government agencies, and (6) organizational commitment can moderate the relationship between the reporting system and the performance accountability of government agencies.*

*Keywords: Utilization Of Information Technology; Accounting Control; Reporting Systems; Organizational Commitment; Performance Accountability Of Government Agencies.*

**PENDAHULUAN**

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan seperti masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menyediakan informasi yang benar, tepat waktu, dan bertanggung jawab.

Penyediaan informasi dan pengungkapan kinerja keuangan merupakan hak masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi, memberikan penjelasan, serta mempertanggung jawabkan kerjanya.

Penyampaian informasi oleh pemerintah kepada masyarakat ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada birokrasi publik dan juga sistem

pemerintahan yang ada. Namun, sampai saat ini baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah cenderung hanya memperhatikan serapan anggaran dan laporan anggaran yang baik. Padahal seharusnya pemerintah juga harus Seimbang dalam memperhatikan kinerjanya, karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kinerjanya. Hal ini sesuai dengan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas publik sesuai dengan karakteristik *good governance* berkenaan dengan (1) partisipasi, (2) aturan hukum, (3) transparansi, (4) *responsive*, (5) *orientasi consensus*, (6) kesetaraan, (7) *efektivitas* dan *efisiensi*, dan (8) visi strategi (mardiasmo, 2018).

Hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah diserahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Penyerahan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Riau tahun 2019 dimana Kota Pekanbaru mendapat hasil evaluasi dengan predikat CC (50-60%) dimana sebenarnya predikat ini telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari nilai SAKIP tahun 2018, hanya ada peningkatan 4 poin saja. Yang mana pada tahun 2018 yang lalu, Pekanbaru meraih predikat CC dengan nilai SAKIP 54%. Sedangkan pada tahun 2019 semalam kota Pekanbaru hanya mendapat nilai 58% dengan predikat CC (menpan.go.id).

Dari permasalahan di atas terlihat bahwa pemerintah kota Pekanbaru belum secara maksimal melaksanakan tugas sesuai yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan juga instruksi presiden. Sehingga kota Pekanbaru hanya dapat memperoleh nilai SAKIP sebesar 58 saja dan dengan peringkat CC. permasalahan ini tentunya menimbulkan dampak yang negatif masyarakat kepada pemerintah dan

mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pemerintah harus menjadikan ini sebagai pembelajaran untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan mengevaluasi OPD yang bermasalah terhadap akuntabilitas kinerja instansi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal, pelaksanaan pengendalian akuntansi yang baik, dan sistem pelaporan yang baik, jujur, serta transparan maka akan dapat mewujudkan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik pula.

Menurut Imronuddin dalam Rahayu (2019) komitmen dalam organisasi memiliki tiga komponen yaitu, kepercayaan yang kuat dari diri seseorang dalam penerimaan nilai dan tujuan organisasi, keinginan seseorang yang keras sesuai keinginan organisasi, dan keinginan dari diri seseorang untuk mempertahankan diri sebagai anggota organisasi tersebut. Semakin kuat sikap dan komitmen, semakin kuat kecenderungan dari diri seseorang untuk diarahkan pada tindakan yang sesuai dengan standar yang ingin dicapai.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah kota Pekanbaru dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel**

### **Moderasi (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)”**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)? dan apakah komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Kemudian untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Menurut Bastian (2010) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

#### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Menurut Lantip dan Rianto (2011) teknologi informasi diartikan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang informasi yang berbasis komputer yang perkembangannya sangat pesat. Hamzah B.Uno dan Nina Lamatenggo (2011)

juga mengemukakan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Pengolahan ini termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu.

#### **Pengendalian Akuntansi**

Menurut krismaji (2010) pengendalian akuntansi adalah pengendalian yang bertujuan menjaga aktiva dan menjamin akurasi dan daya andal catatan keuangan. Menurut (Mulyadi 2012) pengendalian akuntansi dirancang untuk meyakinkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut: (1) Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan atau wewenang manajemen baik yang bersifat umum dan khusus. (2) Transaksi dicatat agar memudahkan penyiapan laporan yang sesuai dengan prinsip akuntansi atau kriteria lain yang sesuai dengan tujuan laporan tersebut. Serta mengadakan pertanggung jawaban atas aktiva. (3) Penggunaan atas aktiva atau harta diberikan hanya dengan persetujuan manajemen. (4) Jumlah aktiva seperti yang terdapat pada laporan catatan perusahaan dibandingkan dengan aktiva yang ada dan bila terjadi perbedaan dilakukan tindakan yang tepat.

#### **Sistem Pelaporan**

Agar dapat memantau hasil kerja pusat pertanggung jawaban, diperlukan sebuah sistem pelaporan. Dalam laporan harus ditunjukkan hasil kerja pusat pertanggung jawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpangan terhadap anggaran. Lebih bermanfaat laporan tersebut apabila disertai dengan analisis tentang penyebab timbulnya penyimpangan. Dapat dikatakan bahwa sistem pelaporan akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian manajemen.

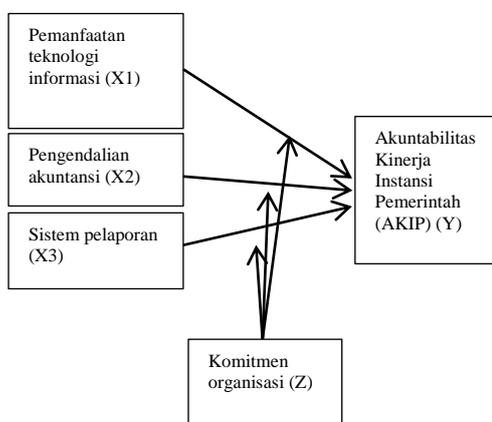
BPKP (2011) beberapa ciri laporan baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah mengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten), tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi, berdaya uji, lengkap, netral, padat, dan terstandarisasi.

### Komitmen Organisasi

Menurut Robbins (2013) menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah keterlibatan pekerjaan yang tinggi yaitu memihak terhadap pekerjaan spesifik seseorang, sedangkan komitmen organisasional yang tinggi yaitu memihak organisasi yang merekrut seseorang tersebut. Dan menurut Luthans (2012) komitmen organisasi adalah sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi serta keyakinan untuk menerima nilai dan tujuan organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi sangat diperlukan dalam sebuah organisasi, karena terciptanya komitmen yang tinggi akan mempengaruhi situasi kerja yang profesional.

Kerangka penelitian yang mendasari penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1**



Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H<sub>2</sub> : Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H<sub>3</sub> : Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H<sub>4</sub>: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan dimoderasi oleh komitmen organisasi.

H<sub>5</sub>: Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan dimoderasi oleh komitmen organisasi.

H<sub>6</sub>: Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan dimoderasi oleh komitmen organisasi.

### METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru, Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah OPD Kota Pekanbaru. Terdapat 33 OPD yang dijadikan sampel. Responden dalam penelitian ini adalah setiap bagian OPD, di setiap OPD akan dibagikan 3 buah kuesioner yaitu kepada kepala dinas, kepala sub bagian keuangan, dan kasubid/ kasubbag/ kasubdis/ kasi.

Terdapat lima variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan komitmen organisasi. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden secara langsung oleh peneliti sebagai data primer, dan dalam menjawab kuesioner responden akan menggunakan *skala likert*.

### **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Instrument penelitian yang digunakan berupa kuesioner yang dikembangkan oleh Herawaty (2011) yang terdiri dari 8 pertanyaan.

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Instrument penelitian yang digunakan berupa kuesioner yang dikembangkan oleh Mauliziska (2015) yang terdiri dari 7 pertanyaan.

### **Pengendalian Akuntansi**

Menurut Krismiaji (2010) pengendalian akuntansi adalah pengendalian yang bertujuan menjaga aktiva dan menjamin akurasi dan daya andal catatan keuangan. Instrument penelitian yang digunakan berupa kuesioner yang dikembangkan oleh Herawaty (2011) yang terdiri dari 4 pertanyaan.

### **Sistem Pelaporan**

Berdasarkan Fauzan (2017) sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan suatu sistem pertanggung jawaban dari bawahan

(pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat mengendalikan serta memantau kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang dikembangkan oleh Herawaty (2011) yang terdiri dari 4 pertanyaan.

### **Komitmen organisasi**

Menurut Steers (2012) Komitmen organisasi merupakan kondisi dimana pegawai sangat tertarik terhadap tujuan, nilai-nilai, dan sasaran organisasinya. Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. Instrument yang digunakan berupa kuesioner yang dikembangkan oleh R.T Mowday, R.M Steers dan L.W Porters (1979) yang terdiri dari 11 pertanyaan.

Kuesioner dalam penelitian ini berbentuk skala *likert* dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor. Kemudian data dari kuesioner dikonversi menjadi data kuantitatif. Sebelum dilakukan pengolahan data, terlebih dahulu dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Berikut ini adalah model persamaan regresi dalam penelitian ini.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots (1)$$

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_4 Z + \beta_5 (X_1 Z) + e \dots (2)$$

$$Y = a + \beta_2 X_2 + \beta_4 Z + \beta_6 (X_2 Z) + e \dots (3)$$

$$Y = a + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_7 (X_3 Z) + e \dots (4)$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

a = Konstansta

$\beta$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Pemanfaatan teknologi informasi  
 $X_2$  = Pengendalian akuntansi  
 $X_3$  = Sistem pelaporan  
 $Z$  = Komitmen organisasi informasi dikali komitmen organisasi  
 $X_{1,2,3}Z$  = Interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi  
 $E$  = eror

Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh pada variabel dependen diperlukan uji statistik t. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Penerimaan dan penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. (2) Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin besar variabel koefisien determinasinya semakin baik variabel-variabel independennya dalam menjelaskan variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah kepala dinas, kepala sub bagian keuangan, dan kasubid/ kasubbag/ kasubdis/ kasi pada masing masing OPD. Kuesioner yang disebar pada penelitian ini sebanyak 99 kuesioner kepada responden yang berada di

lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Dan kuesioner yang kembali sebanyak 92 kuesioner, dan yang tidak kembali sebanyak 7 kuesioner.

**Tabel 1.**  
Statistik deskriptif

	N	Mini mum	Maxim um	Mean	Std. Deviasi on
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengendalian Akuntansi Sistem Pelaporan Komitmen Organisasi	92	17	40	33.03	3.749
Valid N (listwise)	92	20	35	27.11	2.612
	92	12	20	16.72	1.718
	92	10	20	16.11	1.738
	92	28	52	36.62	4.896

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 92. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum sebesar 40, dan nilai rata-rata sebesar 33,03. Variabel pemanfaatan teknologi informasi mempunyai nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum sebesar 35, dan nilai rata-rata sebesar 27,11. Variabel pengendalian akuntansi mempunyai nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 20, dan nilai rata-rata sebesar 16,72. Variabel Sistem Pelaporan mempunyai nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 20, dan nilai rata-rata sebesar 16,11. Variabel Komitmen Organisasi mempunyai nilai minimum sebesar 28, nilai maksimum sebesar 52, dan nilai rata-rata sebesar 36,62.

Hasil uji instrument menyatakan bahwa seluruh item pernyataan valid dan reliabel. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, serta komitmen organisasi memiliki kriteria valid untuk

setiap item pernyataan dengan nilai signifikan  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Ini berarti setiap item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut. Hasil uji reliabilitas instrument penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan dalam nilai *cronbach's alpha* atas variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,837, pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,718, pengendalian akuntansi sebesar 0,649, sistem pelaporan sebesar 0,713, dan komitmen organisasi sebesar 0,667. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karna memiliki nilai *cronbach's alpha* diatas reliabilitas yaitu 0,600.

Sedangkan hasil uji asumsi klasik telah memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari heteroskedastisitas. Sehingga penelitian ini dapat diterima karena data yang dianalisis telah memenuhi kriteria dari uji normalitas dan juga memiliki varian residual yang konstan (homoskedastisitas).

Penelitian ini menggunakan dua model regresi yaitu regresi linier berganda dan regresi moderasi (*Moderated Regression Analisis*) hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,491. Hal ini menunjukkan bahwa 49,1% variabel pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan mempengaruhi AKIP. Sedangkan sisanya 50,7% akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Nilai koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan dapat dilihat pada tabel hasil analisis regresi linier berganda, sehingga didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,966 + 0,199X_1 + 1,261X_2 + 0,224X_3 + e$$

**Tabel 2.**

Hasil analisis regresi linier berganda						
Model		Unstandardized Coefficients		Beta	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	2.966	3.530		.840	.403
	TI	.199	.135	.139	1.474	.144
	PA	1.261	.205	.578	6.163	.000
	SP	.224	.174	.104	1.287	.201
<i>R. Square</i>				0,507		
<i>Adjusted R. Square</i>				0,491		

Pengujian analisis moderasi pertama pada tabel 3, menunjukkan 28% variabel pemanfaatan teknologi informasi yang dimoderasi oleh komitmen organisasi mampu menjelaskan variabel AKIP yang ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,280. Sedangkan sisanya 72% dimoderasi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan tabel dibawah, nilai koefisien regresi variabel moderasi pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi sebesar 0,070 Sehingga:

$$Y = 81,575 - 1,775 X_1 - 1,902 Z + 0,070 X_1 .Z + e$$

**Tabel 3.**

Hasil analisis moderasi pertama						
Model		Unstandardized Coefficients		Beta	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	81.575	30.572		2.668	.009
	Pemanfaatan teknologi informasi	-1.775	1.131	-1.237	1.570	.120
	Komitmen organisasi	-1.902	.843	-2.485	2.258	.026
	$X_1.Z$	.070	.031	3.358	2.244	.027
<i>R. Square</i>				0,304		
<i>Adjusted R. Square</i>				0,280		

Pengujian analisis moderasi kedua pada tabel 4, menunjukkan 55,6% variabel pengendalian akuntansi yang dimoderasi oleh komitmen organisasi, mampu menjelaskan AKIP yang ditunjukkan oleh nilai *adjusted r square* sebesar 0,556. Sedangkan sisanya 43,4% dimoderasi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan tabel 4, koefisien regresi variabel moderasi, pengendalian akuntansi dan komitmen organisasi sebesar 0,110 sehingga:

$$Y = 72,802 - 2,635 X_2 - 1,716 Z + 0,110 X_2 .Z$$

**Tabel 4.**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	T	
1	(Constant)	72.802	16.222		4.488	.00
	Pengendalian akuntansi	-2.635	.999	-1.208	2.639	.10
	Komitmen organisasi	-1.716	.425	-2.242	4.042	.00
	$X_2 .Z$	.110	.026	3.078	4.195	.00
	<i>R. Square</i>		0,571			
	<i>Adjusted R. Square</i>		0,556			

Pengujian analisis moderasi ketiga menunjukkan 13,4 % variabel sistem pelaporan yang dimoderasi oleh komitmen organisasi mampu menjelaskan variabel AKIP yang ditunjukkan oleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,134. Sedangkan sisanya 86,8% dimoderasi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan tabel dibawah ini koefisien regresi variabel moderasi system pelaporan dan komitmen organisasi sebesar 0,063 sehingga:

$$Y = 58,477 - 1,744 X_3 - 0,951 Z + 0,063 X_3 .Z + e$$

**Tabel 5.**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	T	
1	(Constant)	58.477	18.569		3.149	.002
	Sistem pelaporan	-1.744	1.169	-.808	-1.491	.140
	Komitmen organisasi	-.951	.473	-1.243	-2.010	.047
	$X_3 .Z$	.063	.030	1.845	2.139	.035
	<i>R. Square</i>		0,163			
	<i>Adjusted R. Square</i>		0,134			

Hasil Pengujian Hipotesis Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi nilai t hitung (1,474) < t tabel (1,987) dan nilai signifikansi sebesar (0,144) > (0,05). Dari hasil pengujian perhitungan tersebut menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Organisasi Perangkat Daerah kota Pekanbaru telah menggunakan teknologi informasi, tetapi pemanfaatan teknologi informasi itu sendiri oleh instansi pemerintah masih relatif kurang maksimal. Secara spesifik masih diperlukan upaya pengembangan terus menerus dan juga sinergi untuk meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan teknologi informasi. Seharusnya teknologi informasi dalam suatu instansi pemerintah memiliki peranan yang penting dalam menerapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mubarak (2017) dan Frida (2018) dengan hasil penelitian pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil Pengujian Hipotesis Pengendalian Akuntansi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa variabel pengendalian akuntansi nilai t hitung (6,163) > t tabel (1,987) dan nilai signifikansi sebesar (0,000) < 0,05. Dari hasil pengujian perhitungan tersebut, menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima.

Suatu instansi yang memiliki pengendalian akuntansi yang baik maka dapat meningkatkan kinerja dalam instansi tersebut dan sebaliknya apabila suatu instansi pemerintah tidak memiliki suatu pengendalian akuntansi yang baik maka dapat menurunkan kinerja dalam instansi tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putri (2017), dan Naima (2019) dengan hasil penelitiannya adalah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil Pengujian Hipotesis Sistem Pelaporan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa variabel sistem pelaporan nilai  $t$  hitung (1,287) <  $t$  tabel (1,987) dan nilai signifikansi sebesar (0,201) > (0,05). Dari hasil pengujian perhitungan tersebut, menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui kemungkinan sistem pelaporan masih belum dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikarenakan organisasi perangkat daerah kota pekanbaru masih belum mampu memaksimalkan sistem pelaporan yang tersedia untuk dapat mengembangkan akuntabilitas kerjanya menjadi lebih baik lagi. Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah termasuk sistem akuntansi keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan dapat menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan juga akuntabel. Melalui sistem pelaporan yang baik pula instansi pemerintah dapat memantau kinerja yang dilaksanakan berdasarkan output yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yg dilakukan oleh amalia (2017) dan Nurhabibah (2020) dengan hasil penelitian sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil Pengujian Hipotesis Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa nilai  $t$  hitung (2,244) >  $t$  tabel (1,987) dan nilai signifikansi sebesar (0,027) < (0,05). Dari hasil pengujian perhitungan tersebut, menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima.

Pemanfaatan teknologi informasi akan mempengaruhi akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah dengan diperkuat oleh komitmen organisasi. Hal ini didasari dengan pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal dapat terwujud apabila seseorang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasinya. Sehingga apabila seorang aparat pemerintah memanfaatkan teknologi informasi, hal itu diperkuat dengan komitmen terhadap organisasi yang tinggi terhadap organisasinya.

Hasil Pengujian Hipotesis Pengendalian Akuntansi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa nilai  $t$  hitung (4,195) >  $t$  tabel (1,987) dan nilai signifikansi sebesar (0,00) < (0,05). Dari hasil pengujian perhitungan tersebut, menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_5$  diterima.

Adanya pengendalian akuntansi yang baik di lingkungan instansi pemerintah, maka dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dengan komitmen organisasi yang tinggi maka akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh yulianti (2014) dengan hasil penelitian komitmen organisasi memperkuat hubungan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa nilai  $t$  hitung (2,139) >  $t$  tabel (1,987) dan nilai signifikansi sebesar (0,035) < (0,05). Dari hasil pengujian perhitungan tersebut, menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_6$  diterima.

Jika laporan kinerja instansi pemerintah tersebut dibuat sesuai

dengan sistem pelaporan yang telah ditetapkan dan disusun oleh orang-orang yang berkomitmen tinggi maka dapat meningkatkan pertanggung jawaban sasaran indikator kinerja instansi pemerintah tersebut.

Hal ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silalahi (2017) dan Nurhabibah (2020) Dimana hasil penelitiannya adalah komitmen organisasi dapat mempengaruhi hubungan antara sistem pelaporan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi dan variabel sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan variabel pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian variabel komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara variabel pemanfaatan teknologi informasi, variabel pengendalian akuntansi, dan variabel sistem pelaporan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **Saran**

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemecahan masalah dalam hal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah sehingga diharapkan pemerintah dapat lebih mengembangkan lagi teknologi informasinya, selain itu pemerintah juga perlu menggunakan sistem pelaporan yang ada secara maksimal. Kemudian untuk meningkatkan kinerja pemerintah diperlukan pengetahuan yang luas

tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka untuk meningkatkan itu diperlukan sosialisasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat memperoleh data dengan wawancara langsung pada responden agar memberikan data yang lebih lengkap sesuai harapan. Dan untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama agar dapat menambahkan variabel yang lain yang mungkin mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- B. Uno Hamzah dan Nina Lamatenggo. 2011. *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara
- Fauzan, Reyhan Hadi. 2017. *Pengaruh kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. JOM Fekon Vol. 04, Nomor 01. Universitas Riau
- Ghozali, Imam. 2018: *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Krismiaji, 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN
- Luthas, Freed. 2013. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Andi

- Marshall B.Romney dan Paul John Steinbart. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Naima, Albeska Daidatyl . 2019. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Pengendalian Akuntansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai variable Moderasi*. Skripsi. Universitas Riau
- Nurhabibah. 2019. *Pengaruh Kejelasan sasaran Anggaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pengendalian Intern, Sistem Pelaporan, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi*. Skripsi. Universitas Riau
- Prasojo, Lantip Diat dan Riyanto. 2011. *Teknologi Informasi Pendidikan*. Yogyakarta: Gava Media
- Republik Indonesia. Peraturan pemerintah. No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Robbins, Stephan P & Judge, Timothy A. 2013. *Organizational Behavior Edition 15*. New Jersey: Pearson Education
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2019. *Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta,CV
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

[www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)